

Jurnal Pendidikan Ekonomi & Akuntansi

Vol. 10, No. 1, Desember 2016

ISSN 1978-8770

1

Menggagas Kembali Sistem Ekonomi Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat

Indra Darmawan

19

Pengembangan Buku Praktik Akuntansi Manufaktur Dalam Penentuan Harga Pokok Produk Dengan Metode Harga Pokok Proses: Studi Kasus pada Perusahaan Sarung Tangan Jaya Perkasa
Natalina Premastuti Brataningrum & F.X. Muhadi

37

Pengembangan Buku Praktik Akuntansi Perusahaan Jasa untuk Menciptakan Pembelajaran Kontekstual Pada Mata Kuliah Praktik Akuntansi Perusahaan Jasa

L. Saptono & B. Indah Nuhraheni

59

Pengembangan Buku Praktik Akuntansi Perusahaan Dagang Untuk Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Sanata Dharma

Rita Eny Purwanti & Ignatius Bondan Suratno

J. PEA	Vol. 10	No. 1	Halaman 1 - 79	Yogyakarta Desember 2016	ISSN 1978-8770
--------	---------	-------	-------------------	-----------------------------	-------------------

Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Akuntansi

Vol. 10, No. 1, Desember 2016

ISSN 1978-8770

Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Akuntansi (JPEA) merupakan wadah informasi bidang pendidikan ekonomi dan akuntansi berupa publikasi hasil karya penelitian, karya ilmiah lain yang relevan, dan studi kepustakaan.

Jurnal ini terbit pertama kali pada Bulan Desember 2007 dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam setahun pada Bulan Juni dan Desember.

Dewan Redaksi

Pemimpin Umum : Dr. Y. Harsoyo

Sekretaris Redaksi : B. Indah Nugraheni, S.Pd., S.I.P., M.Pd.

Anggota : Dr. S. Widanarto Prijowuntato, M.Si.
Dra. C. Wigati Retno Astuti, M.Si., M.Ed.
Drs. FX. Muhadi, M.Pd.
Dr. C. Teguh Dalyono, M.S.
L. Saptono, S.Pd., M.Si.
Cornelio Purwantini, S.Pd., M.SA.
Indra Darmawan, S.E., M.Si.
Rita Eny Purwanti, S.Pd., M.Si
Y.M.V. Mudayen, S.Pd., M.Sc.

Redaktur Ahli : Dr. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.
(Universitas Sanata Dharma Yogyakarta)
Prof. Dr. Kisyani Laksono, M.Hum.
(Universitas Negeri Surabaya)
Prof. Dr. Augusty Ferdinand, M.B.A.
(Universitas Diponegoro Semarang)
Prof. Dr. C. Asri Budiningsih
(Universitas Negeri Yogyakarta)

Tata letak : Ig. Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.

Administrasi : Natalina Premastuti B., S.Pd., M.Pd.

Alamat Redaksi

Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Sanata Dharma
Jl. Affandi, Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002. Telp (0274) 513301 Ext. 51445 Faks. (0274) 562383

Berlangganan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Sanata Dharma
Jl. Affandi, Mrican, Tromol Pos 29 Telp. (0274) 513301 Ext. 51527, Faks. (0274) 540793
E-mail: lemlit@usd.ac.id.
Harga per exemplar Rp 20.000,-.

Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Akuntansi

Vol. 10, No. 1, Desember 2016

ISSN 1978-8770

DAFTAR ISI

Menggagas Kembali Sistem Ekonomi Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat <i>Indra Darmawan</i>	1-17
Pengembangan Buku Praktik Akuntansi Manufaktur Dalam Penentuan Harga Pokok Produk Dengan Metode Harga Pokok Proses: Studi Kasus pada Perusahaan Sarung Tangan Jaya Perkasa..... <i>Natalina Premastuti Brataningrum & F.X. Muhadi</i>	19-36
Pengembangan Buku Praktik Akuntansi Perusahaan Jasa untuk Menciptakan Pembelajaran Kontekstual Pada Mata Kuliah Praktik Akuntansi Perusahaan Jasa <i>L. Saptono & B. Indah Nugraheni</i>	37-57
Pengembangan Buku Praktik Akuntansi Perusahaan Dagang Untuk Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Sanata Dharma..... <i>Rita Eny Purwanti & Ignatius Bondan Suratno</i>	59-80

EDITORIAL

Salah satu ciri masyarakat modern adalah masyarakat yang mampu mengakomodasi perbedaan kepentingan dalam suatu kerangka kehidupan yang adil dan damai. Setiap zaman, para pemikir telah memberikan gagasan yang memberikan batasan yang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Tahun ini (2016) Oliver Hart dan Bengt Holmstrom mendapatkan hadiah yang paling bergengsi yaitu hadiah Nobel di bidang Ekonomi berkat kontribusinya berupa teori kontrak. Teori kontrak dipandang penting karena perbedaan kepentingan dari para pelaku Ekonomi dapat memunculkan konflik yang tidak produktif. Kontrak yang memberikan hasil optimal harus memberi manfaat bagi semua pihak, dan juga mempertimbangkan risiko yang akan terjadi.

Berbagai gagasan tentang sistem Ekonomi yang cocok dalam konteks Bangsa Indonesia juga digagas oleh Indra Darmawan dalam artikelnya yang mengajak kita untuk merefleksikan kembali sistem Ekonomi Indonesia. Sebuah refleksi penting yang mengingatkan agar sistem Ekonomi yang kita hidupi hendaknya tidak hanya memuat fungsi dan peran negara untuk mewujudkan kemakmuran bangsa, namun terlebih untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara. Maka dibutuhkan pemikiran Ekonomi yang ideal yang holistik, multidisiplin, dan berorientasi kesejahteraan masyarakat. Sistem Ekonomi Indonesia seyogianya berlandaskan kepada pembangunan kemandirian Ekonomi yang berorientasi kepada keberpihakan kepada seluruh Rakyat Indonesia. Hendaknya pemerintah secara bijak memilih peran-peran secara proporsional agar sejalan dengan konstitusi dan dinamika global.

Gagasan-gagasan pembaruan di bidang Ekonomi dan Akuntansi perlu disambut dengan berbagai upaya termasuk didalamnya adalah dalam wujud pengajaran atau

perkuliahan. Dalam kaitan dengan hal tersebut, ada tiga artikel hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ini berkaitan dengan penelitian pengembangan yang menghasilkan buku praktik perkuliahan Akuntansi. Artikel pertama ditulis oleh Natalina Premastuti Brataningrum dan F. X. Muhadi yang merupakan artikel hasil penelitian tentang pengembangan buku praktik Akuntansi manufaktur. Artikel kedua ditulis oleh L. Saptono dan Indah Nugraheni yang merupakan artikel hasil penelitian tentang pengembangan buku praktik Akuntansi perusahaan jasa, dan artikel terakhir ditulis oleh Rita Eny Puranti dan Ignatius Bondan Suratno yang merupakan hasil penelitian tentang pengembangan buku praktik Akuntansi perusahaan dagang. Tiga buah artikel terakhir merupakan penelitian yang menghasilkan produk buku praktik kuliah Akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sekaligus bersifat kontekstual sesuai dengan perkembangan saat ini.

Kami berharap terbitan JPEA ini dapat menjadi wahana pengembangan ilmu Ekonomi dan Akuntansi juga menjadi wahana komunikasi rekan-rekan sejawat yang menggeluti bidang Ekonomi dan Akuntansi baik selaku praktisi maupun akademisi. Kami ucapkan selamat membaca dan terimakasih.

Redaksi

Menggagas Kembali Sistem Ekonomi Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat

Indra Darmawan¹

Abstract

Has seventy years of Indonesian independence. Various development programs have been implemented, including economic development. The debate about what kind of economic system should be applied in Indonesia is also always the realm of ideas over the years. Economic constitution is not always taken into consideration in policy making. Supposedly the idea of the ideal economic system is a system that is based on the idea that a holistic, multidisciplinary and welfare-oriented society. The economic system should be applied in Indonesia based on the principle of economic independence-oriented construct alignments to the Indonesian people and always seek the common good.

Keywords: economic system, economic thought, welfare

A. Pendahuluan

Saat *founding fathers* memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), salah satu tujuan dari dibentuknya NKRI yang terkait dengan masalah ekonomi jelas tertuang dalam alinea kedua dan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada alinea kedua dipaparkan tentang tujuan dari perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang bermuara pada negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sementara pada paragraf keempat berisi tentang tugas pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Saat ini telah tujuh puluh tahun Indonesia menikmati kemerdekaan. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan antara lain: apakah pembangunan ekonomi nasional dan hasil-hasilnya telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia? Apakah masyarakat Indonesia telah merasakan keadaan berdaulat, adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam paragraf kedua Pembukaan UUD 1945? Apakah bangsa Indonesia benar-benar telah merasakan adanya kesejahteraan umum? Apakah perekonomian Indonesia yang dibangun dengan berlandaskan

UUD 1945 telah mewujudkan?

Tulisan ini mencoba menelisik berbagai fakta-fakta perekonomian yang terjadi di Indonesia sejak memasuki era kemerdekaan. Kajian filosofis menjadi kerangka utama tulisan mulai dari perkembangan pemikiran ekonomi di dunia, gagasan sistem ekonomi yang dilandasi konstitusi, dan perkembangan gagasan membangun sistem ekonomi Indonesia yang menuju pada bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur.

B. Sejarah Pemikiran Ekonomi

Perkara peran ekonomi dalam kehidupan masyarakat telah menjadi pertanyaan sejak lama, bahkan masa sebelum masehi. Sejak Aristoteles (384-322 SM), ekonomi sudah dilihat sebagai ilmu praktis yang berbicara tentang perilaku manusia dalam memproduksi. Dalam lingkup ilmu pengetahuan praktis tersebut ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan etika yang berbicara tentang baik-buruk perbuatan manusia. Hal ini kemudian dipertajam oleh pemikiran Adam Smith pada abad ke-17 melalui karya-karya besarnya.

Tanggal 9 Maret 1776 adalah momen bersejarah dalam perkembangan pemikiran

¹ **Indra Darmawan** adalah dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

ilmu ekonomi. Pada tanggal tersebut diterbitkan buku "*An Inquiry into the Nature and Causes the Wealth of Nations*" karya Adam Smith. Buku yang kemudian lebih dikenal sebagai *The Wealth of Nations* ini menjadi tonggak sejarah perkembangan ilmu ekonomi, bahkan penulisnya, Adam Smith dinobatkan sebagai Bapak Ilmu Ekonomi dunia. Buku ini dianggap sebagai peletak dasar ilmu ekonomi. Bila saat ini isinya tidak lagi terasa istimewa, hal ini lebih disebabkan apa yang digagasnya ketika itu telah merasuk dalam cara berpikir manusia saat ini dalam kehidupan sehari-hari.

Menarik untuk dikaji mengenai corak epistemologi *master piece* ini yang menandai kelahiran ekonomi sebagai bidang kajian ilmiah. Dalam paparan *The Wealth of Nations*, ilmu ekonomi muncul dari refleksi filsafat moral atas masalah koordinasi tatanan masyarakat kala itu. Kelahirannya digerakkan oleh prinsip metodologis yang melibatkan langkah penciptaan atas keanekaragaman dimensi tindakan manusia ke dalam pola tindakan manusia dalam transaksi perdagangan (Priyono, 2007). Karya Adam Smith ini memiliki hubungan erat dengan karya lainnya yang berjudul *The Theory of Moral Sentiments* yang secara mendasar berbicara tentang moralitas manusia.

Aristoteles dan Smith merupakan tokoh yang memiliki konteks kronologis historis yang cukup jauh. Meski demikian keduanya menjelaskan hal yang sama tentang ekonomi. Bagi mereka, ekonomi merupakan kegiatan manusia yang melibatkan banyak orang. Kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi menyentuh persoalan kesejahteraan umum dan keadilan. Bagi para pemikir klasik ini, ekonomi bukanlah masalah teknis, melainkan suatu masalah praktis. Dewasa ini, berbagai permasalahan seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi, dan pendapatan penduduk menjadi urusan para ahli ekonomi. Masalah serupa tidak begitu mudah dimengerti oleh mereka yang awam dalam bidang ekonomi. Karena itu mengerti masalah tersebut kita membutuhkan pemahaman yang mendalam berdasarkan teori dan metodologi ekonomi serta kemampuan matematis yang besar.

Namun, masalah ekonomi yang tampak sangat teknis ini, yang hanya dipahami dengan benar oleh seorang ahli ekonomi, merupakan masalah praktis, suatu masalah yang melibatkan banyak orang yang memiliki keahlian dalam bidang lain. Disebut praktis karena kebutuhan ekonomi dan usaha memenuhi kebutuhan tersebut dialami, bahkan diusahakan banyak orang (Dua, 2008).

1. Pemikiran Ekonomi Kaum Pra Klasik

Tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam kelangkaan (*scarcity*) sumber daya - yang kemudian menjadi obyek kajian ilmu ekonomi - sudah setua umur manusia. Penyair Yunani kuno Hesiodus (sekitar 700 SM), misalnya telah merangkai puisi terkenal berjudul *Kerja dan Hari*, yang secara eksplisit berisi persoalan tersebut. Bahkan ia dapat dikatakan sebagai orang yang telah melihat kelangkaan sumber daya sebagai masalah pokok pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam puisinya Hesiodus menulis bahwa manusia harus bekerja, "lantaran dewa-dewa membuat makanan tetap tersembunyi; karena jika tidak, dengan mudah kamu akan memperolehnya dalam sehari apa yang kamu butuhkan untuk setahun." (Priyono, 2007).

Xenophon, seorang filsuf Yunani kuno yang hidup sekitar 430-354 SM, pertama kali memperkenalkan istilah "ekonomi" dalam karya yang berjudul *Oikonomikos*. Istilah ini berarti tata-kelola rumah tangga. Karena kebutuhan sehari-hari rumah tangga bergantung pada hasil pengolahan ladang, istilah itu bagi Xenophon berarti efisiensi manajemen pengolahan lahan (*estate management*). Meski kegiatan komersial mulai berkembang dimana Athena sebagai pusat, perdagangan dalam sistem ekonomi pasar saat itu belumlah lazim. Oleh karena itu yang dimaksud oleh Xenophon dalam *Oikonomikos* lebih menunjuk efisiensi pengelolaan ladang/alam bagi anggota rumah tangga, bukanlah efisiensi transaksi komersial dalam sistem ekonomi pasar. Menurut Xenophon, salah satu kunci efisiensi tersebut adalah pembagian kerja (*division of labor*) dan spesialisasi. Pokok pikiran ini yang kemudian dipertajam oleh Adam Smith dan kemudian mendapat

perhatian khusus dalam ekonom modern.

Filsuf lain yang berpikir tentang ekonomi adalah Plato (sekitar 429-347 SM) yang berfokus pada penyusunan *blue print* bagi negara ideal dalam kemelut yang melanda Athena dan negara-negara kota Yunani lain selama abad ke-5 dan ke-4 SM. Plato memandang rendah terhadap para pekerja kasar dan mereka yang mengejar kekayaan. Aristoteles juga menggagas konsep pemikiran ekonominya didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik, melalui tukar-menukar. Aristoteles adalah orang yang membedakan dua macam nilai barang, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Ia menolak kehadiran uang dan pinjam-meminjam uang dengan bunga, uang hanya sebagai alat tukar-menukar saja, jika menumpuk kekayaan dengan jalan minta/mengambil riba, maka uang menjadi mandul atau tidak produktif. Aristoteles juga menggagas mengenai konsep keadilan yang dibedakan menjadi tiga macam keadilan yaitu distributif, pemulihan dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif terutama diterapkan dalam urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan.

Pada saat keruntuhan kekaisaran Romawi dan mulai berkembangnya feodalisme di Eropa pada abad pertengahan, kegiatan ekonomi menyesuaikan diri dengan struktur masyarakat yang baru. Karena tanah merupakan sumber daya yang dikuasai oleh kaum ningrat, dan pertanian merupakan kegiatan utama, maka sebagian besar produksi dihasilkan oleh para petani kecil penggarap/penyewa tanah. Distribusi hasil pertanian di setiap daerah tidak melalui jual beli di pasar tetapi diatur secara tradisional. Meski pasar dan penggunaan uang belum semaju saat ini, tetapi pada masa itu sudah ada para pedagang, para penukar uang, serta para pengrajin (Soule, 1994).

Agama Kristen yang berkembang di Eropa pada masa itu dipandang sebagai lembaga yang memiliki wewenang, memiliki pengaruh yang besar dan merupakan kekuatan moral yang berusaha menegakkan aturan moral. Seperti pada masa sebelumnya, konsep-konsep ekonomi berkembang tidak sebagai suatu teori yang

terpisah dari ajaran moral tetapi bagian dari tata kehidupan berdasarkan agama. Salah seorang filsuf besar pada masa itu misalnya Thomas Aquinas (1225-1274) dalam bukunya *Summa Theologiae* juga memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam pemikiran konsep-konsep ekonomi. Thomas Aquinas sependapat dengan Aristoteles mengenai prinsip keadilan yang dapat dibagi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan kompensasi. Keadilan distributif berlaku bagi distribusi produk rumah tangga daerah atau satuan ekonomi lainnya, sedangkan keadilan kompensasi berlaku dalam tukar menukar barang dan jasa (harga layak). Dalam keadilan distributif, pendapatan hendaknya ditentukan berdasarkan kebiasaan; pendapatan tersebut harus disesuaikan dengan posisi si penerima. Sementara dalam tukar menukar, harga hendaknya memberi imbalan yang layak untuk semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan barang tersebut. Kedua masalah tersebut - upah yang adil dan harga yang layak - sampai saat ini terus menerus menjadi sesuatu yang diperdebatkan dalam ilmu ekonomi.

Thomas Aquinas juga sejalan dengan para pemikir lain pada jaman itu mengenai pengecaman dikenakannya bunga atas pinjaman atau "riba" karena, seperti halnya Aristoteles, ia berpendapat bahwa pada hakekatnya uang hanyalah sebagai alat tukar dan "tidak beranak". Tetapi ada pengecualian dalam hal penundaan pembayaran, barang diambil dulu baru membayar. Pandangan ini kemudian disempurnakan dan dipergunakan sebagai dasar untuk membenarkan adanya pembayaran bunga. Para pakar yang membenarkan adanya bunga berpendapat dengan meminjamkan uang pemilik uang kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan (*opportunity cost*) dan menanggung risiko kerugian karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh peminjam terhadap pemilik uang serta menanggung risiko kehilangan uang karena kemungkinan tidak dapat dikembalikan atau keterlambatan dalam pembayaran kembali bila tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Intisari dari ajaran ekonomi masa pra klasik antara lain konsep-konsep ekonomi

jaman purba dan konsep-konsep ekonomi abad pertengahan di Eropa yang berpangkal pada konsep ekonomi jaman purba tersebut, menekankan sejumlah hal yang berkali-kali muncul kembali dalam perkembangan teori ekonomi modern saat ini. Beberapa intisari tersebut antara lain: pertanian merupakan dasar dari kegiatan ekonomi lainnya. Perilaku ekonomi dan tata ekonomi berkaitan erat dengan suatu satuan sosial di mana kegiatan itu berlangsung dan perlu dikelola seperti halnya rumah tangga, kota, daerah, kelompok pedagang, atau pengrajin. Perlunya kegiatan dan perkembangan ekonomi dikelola secara arif dan bijaksana. Produksi dan tukar menukar dibenarkan hanya, dan hanya jika, produksi dan tukar menukar tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan, hidup mewah, atau menumpuk harta benda. Hal ini juga sejalan dengan ajaran agama yang mengingatkan bahwa "cinta uang adalah akar segala kejahatan".

2. Pemikiran Ekonomi Kaum Klasik

Filsafat kaum klasik dengan tokoh sentral Adam Smith mengenai masyarakat didasarkan diri pada tindakan-tindakan rasional dan bertolak dari suatu metode alamiah, keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat *full employment*. Asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Pembahasan Smith dalam *The Wealth of Nations* lebih banyak bersifat mikro dengan penekanan pada penentuan harga. Melalui analisis mikro ia menguraikan masalah pembangunan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pendekatan yang digunakan Smith adalah pendekatan deduktif yang digabung dengan penjelasan historis.

Dalam banyak hal pemikiran Smith sejalan dengan paham kaum fisiokrat yang menganggap produksi barang dan jasa sebagai sumber utama kemakmuran suatu negara, bukan melalui perdagangan luar negeri sebagaimana yang dipercayai kaum merkantilis. Jika Kaum fisikokrat menganggap alamiah yang paling menentukan

kemakmuran bangsa-bangsa, maka Smith sebaliknya menganggap manusialah sebagai faktor produksi utama. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan.

Smith juga memaparkan pendapatnya tentang hakikat manusia yang pada dasarnya serakah. Pendapat ini juga sebenarnya sejalan dengan pemikir Yunani kuno yang juga beranggapan bahwa manusia pada hakekatnya memiliki sifat serakah. Namun Smith agak berlainan pendapatnya mengenai dampak dari sifat keserakahan manusia ini. Smith menganggap sifat keserakahan manusia ini akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara terus-menerus. Smith berpendapat bahwa sikap egoistis manusia ini tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang ada persaingan bebas. Dalam penjelasannya, Smith menyatakan bahwa tiap orang yang menginginkan laba dalam jangka panjang (artinya serakah), tidak akan pernah menaikkan harga di atas tingkat harga pasar. Secara sederhana, dalam *The Wealth of Nations* Smith menjelaskan:

"If a pin manufacturer tried to charge more than his competitors, they would take away his trade; if a workman asked for more than the going wage, he would not be able to find work; if a landlord sought to exact a rent steeper than another with land of the same quality, he would get no tenants".

Jadi jika seorang penjual peniti mencoba menetapkan harga lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh para pesaingnya, demikian kata Smith, maka bisnisnya pasti akan hancur karena pembeli akan lari pada pesaing dan tidak ada lagi yang membeli padanya. Demikian juga buruh yang meminta upah lebih tinggi daripada upah pasar akan sulit memperoleh pekerjaan.

Smith juga berpendapat bahwa perilaku manusia pada umumnya didasarkan pada kepentingan diri sendiri (*self-interest*), bukan belas kasihan dan juga bukan perikemanusiaan. Menurut Smith, bukan dari

kebaikan hati sang tukang daging kita mengharapkan makan malam kita, melainkan dari kepentingan si tukang daging sendiri yaitu kepentingannya akan laba.

Smith juga termasuk yang sangat mendukung adanya *laissez faire-laissez passer*, yang menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian. Smith menghendaki agar pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian. Biarkan saja perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak kentara (*invisible hand*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. Jika banyak campur tangan pemerintah, justru pasar akan mengalami distorsi, yang akan membawa perekonomian pada inefisiensi dan ketidakseimbangan.

Salah satu teori lain yang digagas oleh Smith adalah teori nilai (*value theory*). Menurut Smith, barang mempunyai dua nilai yaitu nilai guna (*value in use*) dan nilai tukar (*value in exchange*). Nilai tukar atau harga dari suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga (*labor*) yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Hubungan antara nilai guna dan nilai tukar, menurut Smith suatu barang yang mempunyai nilai guna yang tinggi kadang-kadang tidak mempunyai nilai tukar (tidak bisa ditukarkan dengan barang lain), dan sebaliknya, ada pula barang yang mempunyai nilai tukar sangat tinggi, tetapi tidak begitu berfaedah dalam kehidupan. Hal inilah yang membawa Smith pada sebuah paradoksnya yang terkenal yaitu Paradoks air-intan. Kelemahan analisis Smith pada masalah nilai tukar terletak pada ketidakmampuan Smith membedakan antara utilitas total, utilitas marjinal, dan utilitas rata-rata yang kemudian dipecahkan oleh salah seorang murid Smith yaitu Alfred Marshall.

Teori lain dari Smith yang juga memberi kontribusi berarti dalam perekonomian adalah teori pembagian kerja (*division of labor*). Dalam banyak tulisannya Smith cukup banyak memberikan perhatian pada produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan pengamatan yang mendalam, Smith mengambil kesimpulan bahwa produktivitas

tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui apa yang disebutnya pembagian kerja (*division of labor*). Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi, di mana orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Pembagian kerja dalam produksi peniti menjadi salah satu contoh klasik dalam karyanya *The Wealth of Nations*.

Jean Batiste Say menjadi pendukung pemikiran Adam Smith, memperbaiki sistem Adam Smith dengan cara yang lebih sistematis serta logis. Karya Say dikenal sebagai Hukum Say (*Say's Law*) yaitu "*supply creates it's own demand*" – penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Menurut Say dalam perekonomian bebas atau liberal tidak akan terjadi "produksi berlebihan" (*over production*) yang sifatnya menyeluruh, begitu juga pengangguran total tidak akan terjadi. Peristiwa yang mungkin terjadi menurut Say ialah kelebihan produksi yang sifatnya sektoral dan juga pengangguran yang sifatnya terbatas (pengangguran friksi).

Tokoh klasik lainnya adalah Thomas Robert Malthus. Pola dasar pemikiran Malthus dan kerangka analisisnya ialah menyangkut teori tentang sewa tanah dan teori tentang penduduk. Kelahiran yang tidak terkontrol menyebabkan penduduk bertambah menurut deret ukur padahal persediaan bahan makanan bertambah secara deret hitung (Malthus, 1798). David Ricardo adalah seorang pemikir yang cukup menonjol di antara segenap pakar kaum Klasik. Teori yang dikembangkan oleh Ricardo menyangkut empat kelompok permasalahan yaitu: teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba, teori tentang nilai dan harga, teori perdagangan internasional dan, teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi (Deliarnov, 1995).

3. Pemikiran Ekonomi Kaum Sosialis

Dalam kehidupan sehari-hari istilah sosialisme digunakan dalam banyak arti. Istilah sosialisme selain bisa digunakan untuk menunjukkan sistem ekonomi, juga bisa

digunakan untuk menunjukkan aliran falsafah, ideologi, cita-cita, ajaran-ajaran atau gerakan. Brinton (1981) dalam Deliarnov (1995) mengartikan sosialisme sebagai bentuk perekonomian di mana pemerintah paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat dan menasionalisasikan industri-industri besar seperti pertambangan, jalan-jalan dan jembatan, kereta api, serta cabang-cabang produksi lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam bentuk yang paling lengkap sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk di dalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara dan menghilangkan milik swasta.

Dalam istilah sehari-hari kata "sosialisme" sering dipakai bergantian dengan istilah "komunisme". Antara sosialisme dan komunisme memang memiliki batas yang tipis. Karl Marx sering menggunakan kedua istilah ini secara bergantian. Menurut Brinton (1981) dalam Deliarnov (1995), dinyatakan bahwa sosialisme menggambarkan pergeseran milik kekayaan dari swasta ke pemerintah yang berlangsung secara perlahan-lahan melalui prosedur peraturan pemerintah dengan memberikan kompensasi pada pemilik-pemilik swasta. Sedangkan dalam komunisme peralihan kepemilikan dari swasta ke tangan pemerintah terjadi secara cepat dan 'revolusioner', dilakukan secara paksa dan tanpa kompensasi. Jadi meskipun tujuan sosialisme dengan komunisme sama namun cara untuk mencapai tujuan ini sangat berbeda. Dalam masyarakat sosialis yang menonjol adalah rasa kebersamaan atau kolektivisme (*collectivism*) - dan salah satu bentuk kolektivisme yang ekstrim adalah komunisme, di mana keputusan-keputusan ekonomi disusun, direncanakan, dan dikontrol oleh kekuatan pusat.

Doktrin kaum Klasik tentang *laissez faire-laissez passer*, *invisible hand*, dan tidak perlunya pemerintah campur tangan dalam perekonomian mendapat sorotan keras dari kaum sosialis terutama yang dimotori oleh Karl Marx (1818-1883). Namun demikian, sebenarnya pemikiran tentang perekonomian sosialis telah berkembang jauh

sebelum Marx menuliskan gagasan-gagasannya. Aliran sosialisme sebelum Marx sendiri terbagi atas kelompok pemikir sosialis yang cenderung 'utopis' sifatnya dan mereka yang mencoba merealisasikan gagasan-gagasan mereka membentuk komunitas-komunitas masyarakat sosialis.

Tokoh sosialis-utopis yang terkenal adalah Sir Thomas More (1478-1535). Gagasannya tertuang dalam buku *Utopia* yang diterbitkan tahun 1516 yang berisi gagasan tentang sebuah "negara impian". Dalam buku tersebut More menuliskan di sebuah pulau khayal bernama Utopia, yang dapat ditafsirkan sebagai sebuah negara, semua milik merupakan milik bersama. Semua orang tinggal dalam suatu tempat bersama, di mana makanan serta segala kebutuhan lainnya disediakan secara bersama-sama pula. Tulisan ini kemudian mempengaruhi para pemikir lain setelah More antara lain Tomasso Campanella (1568-1639) dengan bukunya *Civitas Solis*; Francis Bacon (1560-1626) dengan bukunya *New Atlantis*, dan James Harrington dengan bukunya *Oceana*.

Jika pemikiran More dkk. lebih bersifat utopis, di mana mereka hanya mengkhayalkan suatu bentuk komunitas ideal, maka kemudian muncullah tokoh-tokoh sosialis lain yang mencoba merealisasikan gagasan-gagasan mereka tentang suatu komunitas ideal di antaranya Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772-1837), dan Louis Blanc (1811-1882). Ide-ide Owen tentang gerakan sosialis dituangkan dalam buku *The New View of Society* (1816). Owen juga memperjuangkan peran pemerintah dalam pembangunan desa-desa komunal berdasarkan asas koperasi. Untuk merealisasikan gagasannya, ia mendirikan percontohan di New Harmony, Indiana, Amerika Serikat yang diberi nama *parallelogram*.

Charles Fourier yang juga beraliran sama dengan Owen mendirikan apa yang disebut *phalanges* atau *phalanx* untuk merealisasikan gagasannya tentang komunitas sosialis. *Phalanx* merupakan suatu unit komunitas terdiri dari sejumlah orang, sekitar 810 orang, 1000 orang, atau 1620 orang yang hidup dalam suatu *apartment hotel* atau *phalanstery* tempat tinggal

bersama. Dalam sebuah *phalanstery* juga ada toko-toko untuk melayani kebutuhan tiap-tiap orang. Hanya umur komunitas ini tidaklah lama karena hanya dapat bertahan beberapa tahun saja.

Tokoh sosialis lain yang berusaha merealisasikan gagasan adalah Louis Blanc yang menggagas tentang koperasi produksi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Akan tetapi koperasi produksi yang didirikan oleh Blanc dalam kenyataannya tidak berhasil disebabkan beberapa hal antara lain: oposisi dari beberapa kapitalis, kekurangan modal, tidak kuat menghadapi persaingan dalam sistem liberal kapitalis, serta kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan. Beberapa penyebab ini juga masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh koperasi modern saat ini.

Beberapa ide tentang sosialis tersebut di atas kebanyakan masih bersifat utopis, bersifat angan-angan, yang menurut Marx dinilai terlalu naif untuk diikuti. Idealisme mereka memang tinggi, tetapi secara teoretis-praktis tidak bisa direalisasikan. Kalaupun ada yang berusaha merealisasikan gagasannya dengan mendirikan komune-komune, seperti Owen, Fourier, dan Blanc, tetapi kebanyakan segera layu sebelum berkembang. Baru di tangan Karl Marx, ide sosialisme memperoleh "landasan ilmiah" - paling tidak menurut anggapan Marx sendiri.

Dari sekian banyak pakar sosialis, pandangan Karl Marx dianggap paling berpengaruh. Teori-teorinya tidak hanya didasarkan atas pandangan ekonomi saja, melainkan juga melibatkan moral, etika, sosial, politik, sejarah, falsafah, dan sebagainya. Dua buku Marx yang terkenal antara lain *The Communist Manifesto* (1848) dan *Das Kapital* volume pertama (1867). *Das Kapital* volume kedua tidak berhasil diselesaikannya karena ia telah meninggal sebelum karya tersebut selesai ditulis. Kemudian naskah tersebut diselesaikan oleh sahabatnya yaitu Friedrich Engels dan dapat diterbitkan tahun 1885.

Karl Marx yang sangat menentang sistem perekonomian liberal yang digagas oleh Adam Smith dkk. kemudian berusaha "membuktikan" argumennya bahwa sistem liberal/kapitalis itu buruk. Argumen-argumen yang

disusun Marx dapat dilihat dari berbagai perspektif baik dari sisi moral, sosiologi, dan ekonomi.

Dari segi moral Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. Ketidakadilan ini akhirnya akan membawa masyarakat kapitalis ke arah kondisi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan. Walaupun ada pengakuan bahwa sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar ini lebih efisien, akan tetapi sistem ini tetap dikecam sebab sistem liberal tersebut tidak peduli tentang masalah kepincangan dan kesenjangan sosial. Dengan menerapkan sistem "upah besi" kaum buruh dalam sistem perekonomian liberal tidak akan pernah mampu mengangkat derajatnya lebih tinggi karena - istilah Marx - "pasar bebas memang telah mentakdirkannya demikian". Untuk mengangkat harkat para buruh yang sangat menderita dalam sistem liberal tersebut Marx mengajak kaum buruh untuk bersatu, dan sistem perekonomian liberal-kapitalis harus digantikan dengan sistem lain yang lebih memperhatikan masalah pemerataan bagi semua, yaitu sistem perekonomian sosialis-komunis.

Dari perspektif sosiologi, Marx melihat adanya sumber konflik antar kelas. Dalam sistem liberal-kapitalis yang diamati Marx ada sekelompok orang (yaitu para pemilik modal, yang kemudian disebut kaum borjuis) yang menguasai kapital, dan ada sekelompok orang lainnya (yaitu kaum buruh) sebagai kelas proletar yang seperti sudah ditakdirkan untuk selalu menduduki kelas bawah. Jika tidak dilakukan sesuatu, demikian argumentasi Marx, jumlah kaum nestapa ini akan semakin besar. Sebagai langkah antisipasi, Marx menganjurkan agar sistem liberal yang menyebabkan kaum buruh menderita tersebut harus diperbaiki, atau lebih tepat lagi, diganti dengan sistem sosialis yang lebih "berpihak" pada golongan kaum buruh.

Alasan lain mengapa sistem perekonomian liberal harus diganti ialah karena sistem liberal cenderung menciptakan masyarakat berkelas-kelas, yaitu kelas kapitalis yang kaya raya dan kelas buruh yang sangat papa. Marx tidak menginginkan bentuk masyarakat berkelas-kelas seperti ini, dan "obat" satu-satunya yang dapat

dilakukan dalam usaha menciptakan masyarakat tanpa kelas itu adalah dengan memperjuangkan sistem sosialis/komunis.

Dari segi ekonomi, Marx melihat bahwa akumulasi kapital di tangan kaum kapitalis memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi pembangunan dalam sistem kapitalis sangat bias terhadap pemilik modal. Untuk bisa membangun secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, perlu dilakukan perombakan struktural melalui revolusi sosial. Jika langkah ini berhasil, maka langkah berikutnya yang harus diambil adalah penataan kembali hubungan produksi - khususnya dalam sistem pemilikan tanah, alat-alat produksi dan modal). Menurut Marx hanya atas dasar hubungan yang lebih manusiawi ini pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Atas pandangan yang sangat skeptis tersebut, tidak heran jika Marx meramalkan bahwa suatu masa sistem kapitalis akan hancur. Menurut ramalan Marx sistem kapitalis hancur bukan disebabkan oleh faktor-faktor lain, melainkan karena keberhasilannya sendiri. Sistem kapitalis dinilai Marx mewarisi daya *self-destruction*, suatu daya dari dalam yang akan membawa kehancuran bagi sistem perekonomian liberal itu sendiri. Untuk membawa masyarakat pada kehidupan yang lebih baik, sistem liberal atau kapitalis tersebut harus dihancurkan dan diganti dengan sistem lain yang lebih manusiawi yaitu sistem sosialis/komunis.

4. Pemikiran Ekonomi Keynes

Berkat jasa tokoh-tokoh neo-klasik yang melumpuhkan serangan Marx terhadap sistem kapitalis, maka perekonomian pada awal abad ke-20 berjalan sesuai dengan paham *laissez faire-laissez passer* seperti keinginan kaum klasik dan neo-klasik. Berdasarkan pendapat Jean Baptise Say yang mengatakan bahwa penawaran akan selalu berhasil menciptakan permintaannya sendiri, maka tiap perusahaan berlomba-lomba menghasilkan barang sebanyak-banyaknya. Akibatnya produksi meningkat tak terkendali, hingga pada tahun 1930-an dunia mengalami krisis ekonomi yang dahsyat (*great depression*), di mana perekonomian

ambruk, pengangguran terbuka merajalela, dan inflasi membubung tinggi tak terkendali.

Krisis yang dialami oleh negara-negara maju tersebut oleh sebagian pihak dianggap bahwa ramalan Marx tentang kejatuhan sistem kapitalis menjadi kenyataan. Dalam menghadapi persoalan ekonomi yang maha dahsyat tersebut teori-teori ekonomi yang dikembangkan oleh pemikir klasik maupun neo-klasik seakan lumpuh tak berdaya. Teori-teori tersebut untuk menjelaskan fenomena dan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi saja tidak mampu, apalagi memberikan jalan keluar dari kemelut yang dihadapi. Hal ini disebabkan apa yang terjadi pada saat itu sangat berbeda situasinya dengan yang selama dihadapi oleh perekonomian.

Dalam situasi tidak menentu inilah muncul seorang tokoh ekonomi yang kemudian menjadi sangat berpengaruh yaitu John Maynard Keynes (1883-1946). Keynes selain ahli dalam ilmu ekonomi, yang sangat didukung keahliannya dalam matematika, ia juga mempunyai pengetahuan yang luas tentang filsafat, politik, dan bahkan juga sangat akrab dengan dunia sastra, seni lukis, teater drama, dan bahkan tari balet klasik.

Sebagai seorang ekonom, Keynes menulis banyak buku antara lain *Indian Currency and Finance* (1913) yang berisi ketertarikannya pada masalah moneter. Tulisan berikutnya adalah *The Economic Consequences of the Peace* (1919) dan *A Revision of the Treaty* (1922) yang berhubungan dengan pengalamannya dalam delegasi perdamaian Versailles. Pada tahun 1923 ia menulis *A Track on Monetary Reform* yang berisi keprihatinan terhadap perubahan yang terjadi dalam daya beli uang. Pada tahun 1930 Keynes menerbitkan buku yang berjudul *A Treatise on Money* yang menyajikan teori-teori tentang arti dan peran uang dalam perekonomian secara murni dan bagaimana teori-teori murni tentang uang tersebut diterapkan dalam perekonomian. Kemudian pada tahun 1936 Keynes menerbitkan buku yang kemudian menjadi legendaris dan menjadi tonggak sejarah perkembangan pemikiran ekonomi makro yaitu buku *The General Theory of Employment, Interest, and Money*.

Dalam bukunya *The General Theory*,

Keynes menyatakan bahwa pandangan klasik produksi akan selalu menciptakan permintaannya sendiri hanya berlaku untuk perekonomian tertutup sederhana yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan saja. Akan tetapi dalam perekonomian yang lebih maju, di mana masyarakatnya sudah mengenal tabungan, maka sebagian dari pendapatan akan mengalami kebocoran (*leakage*) dalam bentuk tabungan, sehingga arus pengeluaran tidak lagi sama dengan arus pendapatan. Dengan demikian permintaan agregat akan selalu lebih kecil daripada penawaran agregat.

Keynes juga membantah pendapat klasik yang menyatakan bahwa jumlah tabungan akan selalu sama dengan jumlah investasi. Argumentasinya adalah motif orang untuk menabung tidak sama dengan motif pengusaha untuk berinvestasi. Perbedaan motif ini menyebabkan jumlah tabungan tidak akan pernah sama dengan jumlah investasi. Karena Keynes mengamati bahwa umumnya investasi lebih kecil daripada jumlah tabungan, maka ia menyimpulkan bahwa permintaan agregat juga akan lebih kecil daripada penawaran agregat. Kekurangan ini, apabila tidak diantisipasi, akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam perekonomian. Karena sebagian produksi tidak terserap oleh masyarakat, stok akan meningkat, dan pada periode-periode berikutnya terpaksa harus membatasi produksi. Sehingga menurut Keynes bahwa perekonomian yang berjalan menurut mekanisme pasar biasanya mencapai keseimbangan pada titik di bawah *full-employment*. Menurut Keynes, tidak ada mekanisme penyesuaian (*adjustment*) otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan (*equilibrium*) pada tingkat penggunaan kerja penuh.

Berdasarkan pengamatannya terhadap depresi ekonomi pada tahun 1930-an, Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu peran pemerintah justru dibutuhkan. Misalnya jika terjadi pengangguran pemerintah bisa memperbesar pengeluaran pemerintah untuk

proyek-proyek padat karya. Jika harga naik dengan cepat, maka pemerintah bisa menarik jumlah uang beredar dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi, sehingga inflasi bisa lebih terkendali. Dalam situasi di mana terjadi gerak gelombang naik turunnya kegiatan ekonomi, pemerintah dapat menjalankan kebijakan pengelolaan pengeluaran dan pengendalian permintaan efektif dalam bentuk "kontra-siklis" atau "anti-siklis". Dalam berbagai kebijakan yang bisa diambil tersebut, nampak bahwa Keynes lebih sering mengandalkan kebijakan fiskal untuk mengendalikan kestabilan perekonomian.

Dalam analisisnya, Keynes sebenarnya juga mempercayai apa yang digagas oleh kaum klasik dan neo-klasik tentang *laissez faire-laissez passer*. Akan tetapi Keynes menilai bahwa jalan menuju keseimbangan dan *full-employment* tersebut sangat panjang. Sementara Keynes mengatakan bahwa "dalam jangka panjang kita akan mati!" (*in the long run we're all dead!*). satu-satunya jalan untuk membawa perekonomian ke arah yang diinginkan seandainya ia "lari dari posisi keseimbangan" ialah lewat intervensi atau campur tangan pemerintah. Nampak juga bahwa Keynes sependapat dengan Marx bahwa sistem ekonomi kapitalis tidak bebas dari fluktuasi, krisis pengangguran, dan sebagainya. bedanya kalau Marx berusaha menghancurkan sistem kapitalis dan menggantinya dengan sistem sosialis, namun Keynes sebaliknya justru ingin menyelamatkan sistem liberal tersebut.

5. Pemikiran Ekonomi Moneteris

Ada beberapa pandangan Keynes yang tidak disukai oleh pakar-pakar ekonomi, terutama pandangannya tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Kritik paling keras datang dari pakar-pakar ekonomi neo-klasik konservatif yang terbagi atas golongan tua dan golongan muda. Dari golongan tua tokohnya antara lain: Menger, Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises, Wilhelm Ropke, dan Lionel Robbins. Kritikan dari kelompok yang menamakan diri

Libertarian ini bersandar pada prinsip kebebasan individu di atas segala-galanya, dan melihat bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk apapun sebagai ancaman bagi kebebasan individu.

Sementara dari tokoh dari golongan muda yang kemudian menjadi sangat terkenal adalah Milton Friedman dari University of Chicago. Friedman justru melihat peran pemerintah dalam batas-batas tertentu justru diperlukan untuk menciptakan suatu perekonomian di mana pasar bebas dapat berfungsi lebih efektif. Serangan Friedman terhadap pandangan Keynes telah mengurangi dominasi makroekonomi Keynesian dalam mempromosikan kebijakan ekonomi pemerintah. Meski kebijakan Keynes pernah berhasil memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dengan berbagai kebijakan jangka pendek, tetapi keberhasilannya tidak berlangsung lama. Berkali-kali prediksi yang dilandaskan pada pemikiran Keynes meleset dan tidak berhasil memecahkan masalah ekonomi dunia setelah tahun 1970-an. Terlebih dalam menyelesaikan masalah stagflasi, kebijakan fiskal dan moneter Keynes bisa dikatakan sama sekali tidak mujarab.

Ketidakberhasilan ajaran Keynes dalam memecahkan masalah ekonomi dianggap telah melahirkan suatu aliran baru yang disebut "aliran moneteris" yang mengutamakan kebijakan moneter dalam menstabilkan perekonomian. Pada prinsipnya aliran moneteris mengajukan proposisi bahwa perkembangan (kejutan) moneter merupakan unsur yang penting dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja, dan harga-harga; bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan unsur yang paling dapat diandalkan dalam perkembangan moneter, dan bahwa perilaku otoritas moneter menentukan pertumbuhan jumlah uang beredar dalam gelombang konjungtur.

6. Pemikiran Ekonomi Aliran *Supply-Side*

Aliran moneteris memang pernah berhasil meyakinkan orang bahwa stok uang sangat erat kaitannya dengan aktivitas-aktivitas ekonomi. Akan tetapi penerapan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan pandangan

moneteris tidak dijalankan dengan sepenuh hati di Amerika Serikat setelah periode 1970-an. Akibatnya muncullah aliran pemikiran baru yang diyakini dapat memecahkan masalah ekonomi pada masa 1980-an yaitu inflasi dan kelesuan ekonomi yaitu aliran sisi penawaran (*supply-side economics*).

Menurut Harold McCure dan Thomas Willet (1983) dalam Deliarnov (1995), aliran sisi penawaran dapat dibedakan atas dua kelompok yaitu "kelompok utama" dan "kelompok radikal". Kelompok aliran utama diwakili oleh Martin Feldstein (Harvard University) dan Michael Boskin (Stanford University). Kelompok ini menekankan perlunya insentif pajak dalam memacu pertumbuhan ekonomi melalui dampaknya terhadap tabungan dan investasi. Kelompok aliran utama banyak menganalisis dampak perubahan pajak terhadap penawaran tenaga kerja serta dampak program keamanan sosial (*social security*) terhadap jumlah tabungan.

Sementara itu dari kelompok radikal tokohnya adalah Arthur Laffer dan George Gilder serta anggota kongres Jack Kemp. Kelompok radikal menyatakan bahwa pemotongan pajak akan memberikan dampak positif terhadap tabungan, investasi dan penawaran tenaga kerja serta penerimaan total yang lebih banyak dari pajak. Kelompok ini mengajukan dua preposisi yaitu (1) bahwa pemotongan pajak akan memberi dampak besar terhadap produktivitas kerja sehingga secara total penerimaan dari pajak akan meningkat, dan (2) bahwa program pemotongan pajak akan memberi dampak positif dalam meningkatkan laju pertumbuhan output dan mengurangi inflasi.

C. Ekonomi Konstitusi

Suatu konstitusi disebut konstitusi ekonomi jika memuat kebijakan ekonomi di dalamnya (Asshiddiqie, 2010). Diskursus tentang konstitusi ekonomi sebenarnya dimulai sejak Uni Soviet memasukkan persoalan ekonomi di dalam konstitusinya pada tahun 1918 dan Republik Weimar Jerman pada tahun 1919. Kemudian pola konstitusionalisasi kebijakan ekonomi itu diikuti oleh banyak negara lain dalam

berbagai tipologi. Dari sejumlah konstitusi yang diperbandingkan, terdapat empat karakter konstitusi ekonomi. Pertama, konstitusi ekonomi negara liberal-kapitalis seperti Amerika, Australia, Belanda, dan Jerman. Pada tipe ini hal-hal yang diatur di dalam konstitusi adalah jaminan hak milik individual, kebebasan berkontrak dan kompetisi di antara pelaku usaha. Bukan pemerintah, tetapi pihak swasta—yang dinamikanya lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar—yang merupakan aktor utama dalam kegiatan perekonomian. Peranan negara sangat minimalis dan, kalau perlu, hanya membuat aturan agar mekanisme pasar bisa berlangsung dengan leluasa.

Tipe kedua adalah konstitusi ekonomi negara sosialisme dan komunisme seperti Uni Soviet, China, Vietnam dan Korea Utara. Pada kelompok ini, pemerintah merupakan aktor utama dalam kegiatan perekonomian, termasuk dalam membuat aturan dan menjalankan kegiatan ekonomi. Semua sumber daya alam dan alat produksi lainnya adalah milik negara. Kedua tipe di atas menunjukkan adanya pertentangan ideologis yang memengaruhi karakter konstitusi ekonomi. Pertentangan antara ideologi sosialis-komunis dan liberal-kapitalis kentara sekali sejak berdirinya Uni Soviet sampai dengan keruntuhannya (1918-1991). Namun, setelah Uni Soviet bubar, pertentangan ideologis tersebut berangsur merenggang.

Keruntuhan Uni Soviet inilah yang kemudian menjadi titik tolak lahirnya tipe konstitusi ekonomi yang ketiga, yaitu konstitusi ekonomi negara eks komunis. Pada negara eks komunis terjadi proses liberalisasi konstitusi ekonomi. Negara-negara yang memiliki tipe konstitusi ekonomi sosialis-komunis bergeser dengan mengadopsi norma-norma yang ada pada konstitusi negara liberal-kapitalis. Hal ini, misalnya, terjadi pada konstitusi Rusia (1993), sebelumnya konstitusi Uni Soviet (1978), di mana ketentuan tentang hak milik negara atas tanah, mineral, air dan hutan diubah menjadi ketentuan yang berisi hak milik perorangan yang tidak dapat diambil alih kecuali atas putusan. Demikian juga dengan konstitusi Lituania dan Armenia.

Sedangkan tipe konstitusi ekonomi yang keempat adalah konstitusi ekonomi negara nonkomunis seperti Perancis, Portugal, Spanyol, Filipina, dan Brasil. Pada negara-negara nonkomunis, pengaturan tentang peranan negara dan pihak swasta dalam perekonomian diatur secara berimbang. Selain memberikan peranan kepada negara melalui badan-badan khusus, seperti Dewan Ekonomi dan Sosial di Perancis, peranan pihak swasta juga mendapat tempat. Persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi juga menjadi hal yang dijamin di dalam norma konstitusi.

Jika dikaitkan dengan empat tipe konstitusi ekonomi, konstitusi ekonomi Indonesia lebih tepat digolongkan ke dalam tipe keempat, yaitu konstitusi ekonomi negara nonkomunis. Hal ini semakin jelas terlihat setelah amandemen UUD 1945 menjadikan peranan negara dan swasta dalam kegiatan perekonomian sama-sama diakomodasi. Untuk menjelaskan karakter konstitusi ekonomi Indonesia, Jimly memaparkan perdebatan-perdebatan konstitusionalisasi ekonomi yang terjadi seputar amandemen konstitusi (1999-2002). Dalam proses amandemen tersebut terjadi ketegangan antara ekonom yang berpaham idealis, yang diwakili oleh Mubyarto, Dawam Rahardjo, dan Sri-Edi Swasono, dan ekonom yang berpaham pragmatis, seperti Boediono, Sri Mulyani, Syahrir, dan Sri Adiningsih.

Perseteruan dua kelompok tersebut dalam proses amandemen UUD 1945 hampir mengalami kebuntuan karena kedua kubu bersikukuh pada pandangannya masing-masing. Kelompok pragmatis berupaya mengganti Pasal 33 UUD 1945, yang merupakan pasal jantung konstitusi ekonomi Indonesia, dengan nilai-nilai neoliberal untuk memudahkan integrasi perekonomian Indonesia dengan perekonomian global. Sedangkan kelompok idealis berupaya mempertahankan Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan rumusan fundamental ekonomi yang ditelurkan oleh *founding father* yang juga merupakan Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta.

Perseteruan sengit kedua kubu inilah yang akhirnya membuat Mubyarto mengundurkan diri dari Ketua Tim Ahli Ekonomi dalam proses pembahasan

amandemen konstitusi setelah menyampaikan laporan kajian tim ahli kepada Badan Pekerja MPR. Alasannya karena pandangan yang diusungnya kalah dalam pengambilan keputusan yang demokratis dan karena jumlah ekonom yang berpandangan seperti dia sangat sedikit. Pengunduran diri Mubyarto tersebut menyulut kontroversi di dalam masyarakat dan kemudian berhasil membuat Pasal 33 UUD 1945 tidak jadi diganti, melainkan ditambahkan dua ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (5). Cara ini dianggap menjadi jalan tengah untuk meredakan ketegangan pertentangan antara ekonom idealis dan ekonom pragmatis saat itu.

D. Gagasan Sistem Ekonomi Indonesia

Sejarah ekonomi Indonesia telah lama ditorehkan sejak masa kolonial Hindia Belanda hingga saat ini di mana bangsa Indonesia sudah hidup Indonesia merdeka. Berdasarkan sistem ekonomi yang pernah diterapkan selama penjajahan Belanda, sejarah ekonomi kolonial Hindia Belanda dapat dibagi dalam tiga periode yaitu (i) sistem merkantilisme ala VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) sekitar tahun 1600-1800 yang penekanannya pada peningkatan ekspor dan pembatasan impor; (ii) sistem monopoli negara ala sistem tanam paksa sekitar 1830-1870; dan (iii) sistem ekonomi kapitalis liberal sejak 1870 hingga 1945 (Mubyarto, 2000). Sistem-sistem ekonomi kolonial ini di satu sisi meninggalkan kemiskinan bagi rakyat Indonesia, namun di sisi lain melahirkan budaya cocok tanam, sistem uang, dan budaya industri. Bahkan sebenarnya, pemerintah Hindia Belanda telah menjadikan Indonesia - yang selama penjajahan disebut bumi Nusantara - menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia. Pada masa itu, Indonesia merupakan pengeksport terbesar sejumlah komoditas primer, khususnya gula, kopi, tembakau, teh, kina, karet, pala, dan minyak kelapa sawit.

Namun demikian, perkembangan ekonomi yang pesat itu tidak memberi peningkatan kesejahteraan bagi rakyat. Dari penerimaan Hindia Belanda yang sekitar 670 juta gulden saat itu, sebanyak 59,1 juta penduduk pribumi hanya kecipratan 3,6 juta

gulden (0,54 persen), sedangkan penduduk keturunan Tionghoa yang jumlahnya sekitar 1,3 juta orang mendapat 0,4 juta gulden. Sementara sisanya 665 juta gulden (99,4 persen) dinikmati oleh warga kulit putih - yang sebagian besar Belanda - yang hanya berjumlah sekitar 241.000 jiwa (Tambunan, 2006).

Saat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tahun 1945 dan kemudian disusul dengan disepakatinya konstitusi tertinggi dalam NKRI yaitu UUD 1945. Pada UUD 1945 jelas termaktub tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 jelas tertulis bahwa pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Para pemimpin bangsa Indonesia yang menyusun UUD 1945 mempunyai kepercayaan bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata. Dengan tujuan itu ditanamlah dalam UUD 1945 Pasal 33 yang berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas-azas kekeluargaan.
2. Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 kemudian diamandemen dengan tambahan ayat sebagai berikut:

(ayat 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(ayat 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Menurut Hatta (1977), pasal 33 tersebut adalah *sendi utama* bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Di sini yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ialah *koperasi*. Koperasi paham Indonesia yang memberi *segi ekonomi* kepada koperasi sosial lama: gotong royong. Cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern.

Dalam Pasal 33 UUD 1945 usaha-usaha ekonomi yang kecil-kecil dan sedang dikerjakan oleh koperasi. Koperasi diselenggarakan oleh orang-orang kecil dengan modal yang kecil pula. Usaha besar diusahakan oleh negara bukan saja yang menghasilkan "*public utilities*", keperluan umum, tetapi juga cabang-cabang produksi yang penting lainnya, seperti industri pokok dan pertambangan dikuasai oleh negara. Oleh Hatta disebutkan bahwa dikuasai oleh negara tidaklah berarti bahwa pemerintah sendiri dengan birokrasinya yang menjalankan perusahaan. Pimpinan perusahaan itu dapat diserahkan kepada seorang pemimpin atau direksi atau suatu badan yang bekerja secara efektif. Praktik baik dalam pembangunan pabrik semen Gresik layak menjadi sesuatu yang patut dipertimbangkan. Setelah pabrik semen Gresik selesai dibangun, selama dua tahun kontraktor orang Amerika yang memimpin jalannya perusahaan. Setelah dua tahun, pemimpin-pemimpin orang Indonesia meneruskan jalannya dengan efektif dan lancar seolah-olah pabrik masih dipimpin orang asing.

Menurut Hatta (1946), perekonomian suatu negeri pada umumnya ditentukan oleh tiga hal. *Pertama*, kekayaan tanahnya. *Kedua*, kedudukannya terhadap negeri lain dalam lingkungan internasional. Dan *ketiga*, sifat dan kecakapan rakyatnya serta cita-citanya. Terhadap Indonesia menurut Hatta harus ditambah satu pasal lagi yaitu sejarahnya sebagai tanah jajahan. Oleh karena Indonesia meringkuk dalam jajahan

Belanda selama lebih dari tiga abad lamanya, maka keadaan perekonomian seluruhnya tidak sebagaimana mestinya menurut faktor-faktor tersebut di atas.

Pasal lain yang mengatur masalah kesejahteraan warga negara adalah pasal 27 ayat 2 UUD 1945 juga dengan sangat jeli para pendiri bangsa Indonesia memiliki maksud baik untuk melindungi pekerja Indonesia. Pasal tersebut yang berbunyi "tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Menurut Hatta (1977), untuk melindungi pekerja hendaklah upah minimum ditetapkan dengan undang-undang dengan menjadikan situasi saat itu sebagai acuan. Pada masa tersebut upah minimum sehari sama dengan harga 5 kilogram beras. Jika dibandingkan dengan situasi saat ini, upah yang berlaku saat ini secara relatif lebih rendah dibandingkan masa Hindia Belanda. Menurut Hatta situasi ini tentunya sangat memalukan sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki kedaulatan tetapi rakyatnya hidup dalam kemelaratan.

Dalam Undang-undang yang diharapkan oleh Hatta juga hendaklah ditetapkan bahwa upah dan gaji cukup untuk hidup. Tidak saja cukup untuk makan dan pakaian, tetapi juga untuk membawar sewa rumah, belanja anak-anak bersekolah, dan membayar pajak serta dapat mengadakan tabungan meski sedikit. Kalangan pengusaha hendaknya menyediakan rumah tempat tinggal bagi buruh dan keluarganya yang layak bagi kemanusiaan dan menjamin kesehatan sekeluarga. Tiap-tiap perusahaan yang cukup besar diharapkan berlangganan seorang dokter yang sewaktu-waktu datang memeriksa kesehatan buruhnya (Hatta, 1977). Para pengusaha juga diharapkan dapat mengadakan cadangan yang berkelanjutan agar dapat membantu para buruh saat terjadi pengangguran.

Secara umum perekonomian harus berdasar demokrasi ekonomi, yaitu kemakmuran bagi semua orang. Bumi dan air dan kekayaan alam adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sehingga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bung Hatta menggambarkan ukuran dari pencapaian kemakmuran rakyat adalah sebagai berikut:

"Negeri belumlah makmur dan belum menjalankan keadilan sosial, apabila fakir miskin masih berkeliaran di tengah jalan, dan anak-anak yang diharapkan akan menjadi tiang masyarakat di masa datang terlantar hidupnya."

Implementasi pemikiran ekonomi dalam tataran praktis tentu tidak akan terlepas dari politik ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Hatta (1967) secara lugas dalam pidato pengukiran Guru Besar Luar Biasa di Universitas Padjajaran memaparkan gagasannya tentang kaitan teori ekonomi, politik ekonomi, dan orde ekonomi. Beberapa pakar menyetujui bahwa ilmu ekonomi dan politik perekonomian terletak dalam dua daerah yang berlainan sama sekali. Ilmu ekonomi mengatakan, bagaimana adanya, politik perekonomian menghendaki bagaimana mestinya. Menurut Hatta (1967) ekonomi adalah ilmu yang empiris. Teori ekonomi memberi keterangan tentang tabiat manusia yang umum dilakukannya dalam tindakannya menuju kemakmuran. Tabiat manusia dalam menuju kemakmuran itulah yang menjadi obyek pengetahuan ekonomi. Tetapi dalam alam yang lahir tindakan ekonomi itu tidak berdiri sendiri tetapi menyangkut segi lainnya seperti masalah fisik, psikis, etik, teknik, dan yuridis.

Teori ekonomi klasik permulaannya dikupas dalam alam abstraksi, dan paling banyak didasarkan pada keadaan perekonomian di Inggris pada masa itu. Dan hal tersebut dianggap sudah cukup bagi politik ekonomi negara-negara lain yang kedudukannya berlainan. Oleh sebab itulah datang tantangan pertarungan gagasan dari aliran historis yang berkembang di Jerman. Teori ekonomi klasik dalam rangkaian logikanya memang benar, tetapi tidak dapat diaplikasikan begitu saja ke dunia yang sangat berbeda dengan negara asalnya. Pada masanya, Adam Smith atas pengaruh filosofi rasionalisme abad ke-18 dan paham tentang hukum alam, percaya bahwa penghidupan ekonomi juga dikuasai oleh hukum alam. Ada semacam harmoni dalam kepentingan manusia. Dalam menuju kepentingan umum, ada *invisible hand* yang mengatur segala-galanya menuju ke keseimbangan.

Pada umumnya setiap pemikiran ekonomi mulai pra klasik, klasik, sosialis, neo

klasik, keynes, monetaris, dan seterusnya selalu memberi jawaban atas permasalahan ekonomi yang terjadi pada masanya. Namun demikian tidak semua dapat menyelesaikan masalah di semua tempat dan semua waktu. Selalu ada kelemahan-kelemahan yang tersembunyi pada setiap gagasan yang terlontar dan yang diaplikasikan oleh para pemikir ekonomi tersebut. Di sinilah peran politik ekonomi menjadi cukup signifikan.

Politik ekonomi yang diartikan sebagai sebuah siasat untuk melaksanakan teori-teori ekonomi secara rasional dalam alam yang lahir (Hatta, 1967). Politik ekonomi mengemukakan apa yang mesti dikerjakan untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dalam melaksanakan rencana dalam alam yang lahir, dengan memperhatikan pula faktor-faktor non ekonomi. Politik perekonomian mengemukakan tujuan yang normatif. Coraknya ditentukan oleh ideologi, politik negara, dan paham kemasyarakatan.

Lantas bagaimanakah semestinya corak ekonomi Indonesia yang mestinya dibangun? Hatta (1967) menegaskan bahwa tugas kita membangun ekonomi Indonesia dengan tujuan yang murni, sesuai dengan Pancasila. Dalam membangun negara dan masyarakat kita terikat kepada ideologi yang sudah tertanam dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara Indonesia menurut Hatta adalah sosialisme Indonesia yang diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pegangan untuk melaksanakan terletak dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2, Pasal 33, dan Pasal 34.

Beberapa pakar ekonomi Indonesia telah berusaha menterjemahkan apa yang menjadi amanat dalam UUD 1945 tentang sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Gagasan Sistem Ekonomi Pancasila mulai dilontarkan pada tahun 1965 ketika Emil Salim menulis suatu artikel pendek di Harian Kompas tentang Sistem Ekonomi Pancasila. Namun tulisan ini tidak direspon publik, mungkin disebabkan adanya risiko politik yang dirasakan kalangan akademisi pada masa itu dan juga tulisan tersebut masih bersifat umum yang menyebut unsur aksiologi saja. Kemudian ekonomi Mubyarto (1999) juga menggagas tentang Sistem Ekonomi Pancasila yang diyakini merupakan pengejawantahan dari amanat UUD 1945.

Jika kita menghendaki Ekonomi Pancasila - sering juga disebut Ekonomi Kerakyatan - sebagai suatu sistem ekonomi yang akan diterapkan, maka harus dapat dijelaskan melalui pendekatan filsafat dengan tiga pendekatan yang dikenal yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam perspektif ontologi eksistensi Ekonomi Pancasila yang disebutkan praktiknya dengan mudah dapat ditemui dalam kehidupan nyata di lingkungan masyarakat Indonesia, sebagai ekonomi rakyat, bersifat moralistik, demokratik dan mandiri (Mubyarto, 1999). Bila ekonomi rakyat yang diidentikkan dengan Ekonomi Pancasila, yang banyak dijumpai di daerah-daerah, di pedesaan dan kota-kota kecil maupun di kampung-kampung yang berada pada daerah perkotaan. Pada umumnya, di wilayah tersebut banyak dijumpai industri/kerajinan rakyat bercirikan kolektivisme, dimana berlaku kepemilikan kolektif atas faktor-faktor produksi yang menghasilkan produk kolektif/individu, dengan distribusi yang berorientasi pada pemenuhan pasar lokal. Jika praktik sederhana tersebut dijadikan rujukan, maka praktik tadi hanya sekedar gambaran dari sebuah "ekonomi tradisional"; bukan sistem ekonomi dalam arti sebenarnya. Ekonomi tradisional merupakan kondisi faktual yang dihadapi oleh negara berkembang, bersendikan masyarakat sipil (*civil society*) dan dialog serta perekonomian yang bersifat subsistem dan intensif sumber daya manusia.

Sistem ekonomi lainnya yang telah disebutkan sebelumnya, namun tidak berbeda prinsip dengan ekonomi Pancasila adalah Ekonomi Kerakyatan. Sumawinata (2004) mengatakan bahwa Ekonomi Kerakyatan adalah "gagasan" tentang cara dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat, yang pada umumnya berdomisili di pedesaan. Ekonomi Kerakyatan ini menghendaki adanya pendekatan terhadap kebebasan ekonomi dan partisipasi seluruh masyarakat, sehingga peranan pemerintah harus mampu mewujudkan adanya demokrasi ekonomi, keadilan sosial dan mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Artinya, Ekonomi Kerakyatan ini mendekati sistem ekonomi pasar sosialis, yang dikemas dengan realita Indonesia.

Analisis sistem ekonomi berdasarkan pendekatan epistemologis pada prinsipnya membahas tentang asal, sumber, metode, struktur dan validitas sistem ekonomi yang bersangkutan. Dawam Rahardjo (2004) menyebutkan bahwa pada tahun 1981, Arief Budiman; berdasarkan pendekatan sosiologi, mengatakan konsep manusia dalam Ekonomi Pancasila adalah *homo socius* dan *homo religius*. Berbeda dengan dengan konsep menurut ekonomi sosialis; hanya murni sebagai *homo socius*, yang cenderung melakukan kerjasama dan mengutamakan kepentingan lebih umum, dibandingkan pribadi. Sementara sistem kapitalis, memandang manusia sebagai *homo economicus*, dengan kecenderungan sifat serakahnya, tidak mau diatur dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya.

Permasalahannya adalah ide Arif Budiman ini tidak dikembangkan lebih lanjut, padahal Mubyarto sendiri mengusulkan perlunya pendekatan multidisipliner dalam melihat gejala ekonomi (termasuk Ekonomi Pancasila), karena ketidakmampuan mazhab neoklasik untuk melihat semua gejala ekonomi yang terus berkembang dalam dimensi waktu dan ruang yang berbeda.

Gie (1995) dalam tulisannya pernah mempertanyakan koperasi sebagai sokoguru keadilan ekonomi; lebih mementingkan bentuknya atau jiwanya. Pertanyaan ini muncul sebagai suatu realitas ekonomi, dimana perkembangan koperasi menjadi termarginalkan dengan kebijakan ekonomi pemerintah yang lebih mementingkan pemodal besar (konglomerat), sehingga Gie menawarkan perlunya menumbuhkan semangat ("jiwa") kebersamaan, tanpa melihat bentuk hukum badan usaha-nya; Dan ini bukan merupakan ranah teori ekonomi murni untuk menjawab, mungkin yang lebih tepat menjawabnya adalah antropologi ekonomi atau sosiologi. Namun, paling tidak pola pemikiran Arief Budiman dan Kwik Kian Gie terdapat persamaan mengenai Ekonomi Pancasila, karena koperasi adalah wujud operasional dari bekerjanya Sistem Ekonomi Pancasila. Masih menurut Gie (1998), dalam tulisannya meluruskan pemahaman tentang kapitalisme; dibolehkannya perorangan (individu) memiliki

kapital secara tunai maupun dalam bentuk alat-alat produksi. Kepemilikan atas kapital tadi, tidak melarang individu bersangkutan meminjamkannya, dengan mendapat bunga atau untuk berusaha, sehingga mendapatkan hasil. Artinya, kapitalisme ini akan selalu ada ("tidak terhindarkan") dalam pelbagai pilihan sistem ekonomi, yang penting adalah pemerataan kesempatan, yang diatur dalam suatu regulasi. Pola pikir di atas, dikaitkan dengan pasal 33 UUD 1945, menimbulkan pertanyaan apakah semangat ("jiwa") koperasi bernafaskan pada pemahaman kapitalisme ini. Dari sudut pemikiran ini jelas dapat dibenarkan, karena walaupun ditegaskan koperasi adalah kumpulan orang-orang, namun kumpulan orang-orang tersebut menitipkan uang-nya ("modal") untuk dikelola oleh Koperasi.

Pertanyaan selanjutnya apakah wujud dari Sistem Ekonomi Pancasila (kemudian berasimilasi menjadi Ekonomi Kerakyatan) adalah bertumpu pada pengembangan usaha koperasi sebagai wujud operasional-nya. Kalau dikatakan "ya"; apakah ada bedanya dengan koperasi yang telah berkembang pesat di Eropa Barat, sebagai kelompok penganut negara kesejahteraan (*Welfare State*), atau contoh koperasi yang berkembang pada negara yang menganut sistem pasar sosial, seperti Rabobank di Belanda, yang dimiliki koperasi. Secara ideologis Ekonomi Pancasila (Kerakyatan) sudah tertuang sepenuhnya dalam UUD 1945, implementasi faktual-nya sebagai klaim epistemologis, terutama dari aspek metodologi yang dapat diuji kebenarannya masih memerlukan jalan panjang, karena pemahaman koperasi, baik bentuk hukum maupun operasional-nya tidak berbeda negara lain yang menganut paham ekonomi sosialis. Realita yang ada dalam perekonomian Indonesia, menempatkan koperasi kalah bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, yaitu swasta dan BUMN. Koperasi berkembang pada strata masyarakat pinggiran dan pedesaan, dengan keterbatasan akses pada sistem finansial konvensional. *Best practice* di banyak daerah di Indonesia, yang dikenal sebagai kearifan lokal perlu dikaji lebih intensif, sebagai pembelajaran untuk menemukan praktik Ekonomi Pancasila (Ekonomi Kerakyatan)

pada tataran lokal, yang dapat diangkat pada tataran nasional, melalui pendekatan metode induktif.

Pendekatan aksiologis lebih menekankan tentang nilai secara umum, sehingga dalam konteks sistem ekonomi, penekanannya adalah bagaimana sistem tersebut memberikan kebaikan bagi warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, keinginan untuk menjadikan Ekonomi Pancasila (Kerakyatan) sebagai suatu sistem, tentunya akan berhubungan dengan tujuan dan hasil akhirnya.

Tujuan yang ingin dicapai secara normatif merupakan "nilai-nilai" dari Pancasila terutama keadilan sosial, kemudian dihubungkan dengan penjabarannya dalam UUD 1945, pasal 27 ayat (2) Negara menjamin penduduknya untuk mendapatkan pekerjaan, pasal 33 yang menekankan pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk kemakmuran penduduk, dan pasal 34 yang mengatur kewajiban negara memelihara fakir miskin.

E. Penutup

Konstitusi Negara Indonesia yang berkaitan dengan konsep dasar sistem perekonomian nasional, semestinya tidak hanya digunakan sebagai landasan kerangka pikir dalam menetapkan paradigma sistem ekonomi bangsa, namun jika mau menyelami lebih dalam, terkandung pesan filosofis dan moral yang demikian menjunjung tinggi kepentingan keselamatan bangsa demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dalam arti yang sebenarnya dan mulia. Jika kita menyimak pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di dalamnya tidak hanya termuat fungsi dan peran negara untuk mewujudkan kemakmuran/kesejahteraan bangsa, namun terlebih kewajiban untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara secara utuh. Sehingga pemikiran ekonomi yang ideal untuk diterapkan adalah pemikiran ekonomi yang holistik, multidisiplin dan orientasi kesejahteraan masyarakat

Sistem ekonomi yang dipilih untuk diterapkan di Indonesia seyogyanya berlandaskan kepada prinsip membangun kemandirian ekonomi yang berorientasi keberpihakan kepada seluruh rakyat Indo-


nesia yang secara selektif memilih dan menempatkan fungsi dan peran negara/pemerintah secara proporsional dalam menetapkan kebijakan ekonomi nasional yang sejalan dengan roh dan jiwa konstitusi negara dan aplikatif dengan perkembangan dan kebutuhan bangsa dalam dinamika global.

Daftar Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. "Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi". *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar yang diadakan oleh Universitas Trisakti, Jakarta, 12 Juli 2012.
- Deliarnov. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dua, Mikhael. 2008. *Filsafat Ekonomi: Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Gie, Kwik Kian. 1995. *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*. Cetakan Keempat. Juli 1995. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gie, Kwik Kian. 1998. *Gonjang-ganjing Ekonomi Indonesia - Badai Belum Akan Segera Berlalu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Grossman, Gregory. 1984. *Sistem-Sistem Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hatta, Mohammad. 1946. "Ekonomi Indonesia di Masa Datang". Pidato Bung Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Konferensi Ekonomi di Yogyakarta tanggal 3 Februari 1946.
- Hatta, Mohammad. 1967. "Teori Ekonomi, Politik Ekonomi, dan Orde Ekonomi". Pidato pada upacara pengukuhan jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Politik Perekonomian di Universitas Padjajaran, Bandung, 17 Juni 1967.
- Hatta, Mohammad. 1977. "Pengertian Pancasila". Pidato peringatan lahirnya Pancasila di Gedung Kebangkitan Nasional. Jakarta: 1 Juni 1977.
- Hausman, Daniel M.(ed). 2008. *The Philosophy of Economics: An Anthology*. Third Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Malthus, Thomas Robert. 1798. *An Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet and Other Writers*. Edisi Pertama. Penerbit Penguin.
- Muhyarto. 1999. *Membangun Sisem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Priyono, B.Herry. 2007. "Adam Smith dan Munculnya Ekonomi: Dari Filsafat Moral ke Ilmu Sosial". *Jurnal Diskursus*. Volume 6 Nomor 1, April halaman 1-40.
- Rahardjo, M. Dawam. 2009. "Menuju Sistem Ekonomi Indonesia". *Jurnal UNISIA*. Volume XXXII No. 72 Desember 2009.
- Smith, Adam. [1759] 2002. *The Theory of Moral Sentiments*. Edited by Knud Haakonssen. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smith, Adam. [1776] 1976. *The Wealth of Nations*. Oxford: Oxford University Press.
- Soule, George. 1994. *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka: Dari Aristoteles hingga Keynes*. Penerjemah: T. Gilarso. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sumawinata, Sarbini. 2004. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tambunan, Tulus. 2006. *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Jl. Affandi, Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002
Telepon (0274) 513301 Ext. 51527 , Faks. (0274) 540793
E-mail: lemlit@usd.ac.id

ISSN 1978-8770

9 771978 877086